
Analisis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): Menelaah Dimensi yang Belum Terjangkau dalam Kajian-Kajian Sebelumnya

Tarisa Ramadhani^{1)*}, Sarah Salsabilla²⁾, Gresya P V Naibaho³⁾, Miranda⁴⁾, Tasya Gracela Hutagalung⁵⁾, Naya Chairinisah Lubis⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6)}Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan

Email : ramadhanitarisa64@gmail.com
sarahsalsabila160@gmail.com
gresyanaibaho7@gmail.com
mt2969824@gmail.com
tasyahutagalung18@gmail.com
nayanisah349@gmail.com

Abstrak

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan salah satu kebijakan desentralisasi kurikulum di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks lokal. Meskipun berbagai penelitian mengenai KTSP telah dilakukan, sebagian besar kajian masih berfokus pada perbandingan struktural antar kurikulum dan implementasi pembelajaran di tingkat kelas. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi kesenjangan penelitian dalam kajian KTSP melalui pendekatan kajian literatur kritis. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap artikel ilmiah, dokumen kebijakan pendidikan, serta publikasi akademik yang relevan dengan implementasi dan pengembangan KTSP. Hasil sintesis literatur menunjukkan adanya tiga dimensi yang masih relatif kurang dikaji, yaitu keterlibatan komite sekolah dalam pengembangan kurikulum, kesenjangan kapasitas antardaerah dalam penyusunan KTSP secara mandiri, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi KTSP sebagai kurikulum berbasis otonomi sekolah masih menghadapi tantangan struktural yang memerlukan kajian empiris lanjutan. Artikel ini memberikan kontribusi konseptual dalam memetakan arah penelitian selanjutnya untuk memperkuat implementasi kurikulum berbasis desentralisasi di Indonesia.

Kata kunci: *KTSP, Desentralisasi Kurikulum, Otonomi Sekolah, Evaluasi Kurikulum, Kajian Literatur Kritis*

Abstract

The School-Based Curriculum (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP) represents a decentralization policy in Indonesia's education system that grants schools authority to develop curricula based on students' characteristics and local contexts. Although numerous studies on KTSP have been conducted, most of them primarily focus on structural comparisons between curricula and classroom-level implementation practices. This article aims to identify research gaps in KTSP studies through a critical literature review approach. The data were collected through a systematic review of scholarly articles, policy documents, and academic publications related to KTSP implementation and development. The findings indicate three underexplored dimensions in the existing literature: the role of school committees in curriculum development, disparities in institutional capacity across regions in independently designing KTSP documents, and the absence of sustainable curriculum evaluation mechanisms at the school level. These findings suggest that the implementation of KTSP as a school-based curriculum policy still faces structural challenges that require further empirical investigation. This article contributes conceptually by mapping future research directions to strengthen the implementation of decentralized curriculum policies in Indonesia.

Keywords: *KTSP, Curriculum Decentralization, School Autonomy, Curriculum Evaluation, Critical Literature Review*

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan komponen fundamental dalam sistem pendidikan karena berfungsi sebagai pedoman arah penyelenggaraan proses pembelajaran sekaligus instrumen strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, perubahan kurikulum merupakan dinamika yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu pendidikan.

Sejak diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004 hingga implementasi Kurikulum Merdeka pada periode mutakhir, setiap kebijakan kurikulum membawa orientasi pembaruan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan perkembangan pendidikan nasional. Salah satu kebijakan penting dalam sejarah reformasi kurikulum nasional adalah implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mulai diberlakukan pada tahun 2006 sebagai bentuk konkret desentralisasi pengelolaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan dengan tetap mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan secara nasional. Kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik, potensi daerah, dan kebutuhan lingkungan sosial budaya setempat. Dengan demikian, KTSP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pendidikan berbasis konteks lokal melalui penguatan otonomi satuan pendidikan (Mulyasa, 2008).

Secara konseptual, implementasi KTSP merepresentasikan pergeseran paradigma pengelolaan kurikulum dari sistem yang bersifat sentralistik menuju pendekatan desentralistik dan partisipatif. Dalam kerangka ini, sekolah diberikan kewenangan untuk merancang struktur kurikulum, mengembangkan silabus, serta menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungan pendidikan masing-masing (Muslich, 2007). Selain itu, penyusunan KTSP juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, dan komite sekolah sebagai representasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis partisipasi publik.

Seiring dengan implementasinya, berbagai penelitian mengenai KTSP telah dilakukan dengan fokus yang beragam, antara lain kajian komparatif antara KTSP dan kurikulum lainnya, analisis implementasi pembelajaran berbasis KTSP di berbagai mata pelajaran, serta evaluasi ketercapaian kompetensi peserta didik dalam kerangka kurikulum tersebut. Penelitian Hakim (2017), menunjukkan bahwa KTSP memiliki karakteristik struktural yang berbeda dibandingkan Kurikulum 2013, terutama dalam orientasi pendekatan pembelajaran yang relatif lebih berpusat pada guru. Sementara itu, penelitian Prasetyo dan Kumalasari (2023) menegaskan bahwa KTSP memberikan ruang otonomi yang cukup luas bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal. Di sisi lain, penelitian Amar (2019) menunjukkan adanya hubungan positif antara implementasi KTSP dan peningkatan prestasi belajar peserta didik pada konteks tertentu.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian mengenai KTSP masih berfokus pada aspek perbandingan struktural antar kurikulum dan implementasi teknis pembelajaran di tingkat kelas. Dimensi yang berkaitan dengan tata kelola pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan belum banyak dikaji secara komprehensif. Padahal, keberhasilan implementasi KTSP sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi pemangku kepentingan sekolah, kapasitas institusi pendidikan dalam menyusun kurikulum secara mandiri, serta keberlanjutan proses evaluasi kurikulum yang dilakukan secara sistematis.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan kapasitas satuan pendidikan dalam menyusun KTSP secara mandiri, khususnya pada sekolah yang berada di luar wilayah perkotaan (Halimah et al, 2009). Selain itu, kajian mengenai peran komite sekolah dalam pengembangan KTSP juga masih sangat terbatas, meskipun secara normatif komite sekolah memiliki posisi strategis sebagai mitra sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum berbasis partisipasi masyarakat. Di sisi lain, mekanisme evaluasi berkelanjutan terhadap relevansi dan kualitas KTSP di tingkat satuan pendidikan juga belum menjadi perhatian utama dalam penelitian-penelitian sebelumnya (Sadad, 2017).

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang berkaitan dengan tiga dimensi penting dalam implementasi KTSP, yaitu: (1) keterlibatan komite sekolah dalam proses pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan; (2) kesenjangan kapasitas antardaerah dalam penyusunan KTSP secara mandiri; dan (3) mekanisme evaluasi berkelanjutan terhadap relevansi kurikulum dengan kebutuhan lokal. Ketiga dimensi tersebut memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas implementasi KTSP sebagai kurikulum berbasis otonomi satuan pendidikan.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dimensi-dimensi yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya mengenai KTSP melalui pendekatan kajian literatur kritis (*critical literature review*). Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya peta penelitian kurikulum di Indonesia serta menjadi dasar bagi pengembangan penelitian empiris lanjutan mengenai implementasi kurikulum berbasis desentralisasi pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur kritis (*critical literature review*) untuk mengidentifikasi pola kajian, kecenderungan penelitian, serta kesenjangan konseptual dalam studi-studi mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan melakukan pengujian hipotesis empiris, melainkan melakukan analisis sintesis terhadap temuan-temuan penelitian sebelumnya guna membangun pemetaan konseptual yang lebih komprehensif mengenai posisi kajian KTSP dalam literatur pendidikan di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis terhadap artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan topik KTSP. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai sumber database ilmiah nasional, antara lain Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan repositori perguruan tinggi, dengan menggunakan kata kunci: *KTSP*, *implementasi KTSP*, *pengembangan kurikulum sekolah*, *evaluasi kurikulum sekolah*, dan *perbandingan kurikulum nasional*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen kebijakan pendidikan nasional sebagai rujukan utama, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, serta panduan penyusunan KTSP yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria seleksi, yaitu: (1) artikel ilmiah yang membahas implementasi atau pengembangan KTSP; (2) artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah pendidikan atau publikasi akademik yang relevan; (3) literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan aspek implementasi, evaluasi, atau perbandingan kurikulum; serta (4) dokumen kebijakan pendidikan yang menjadi dasar regulatif penyusunan KTSP. Sementara itu, literatur yang bersifat opini populer dan tidak memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian tidak dimasukkan dalam analisis.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama. Tahap pertama adalah klasifikasi literatur berdasarkan fokus kajian penelitian, yaitu kajian komparatif kurikulum, implementasi pembelajaran berbasis KTSP, dan evaluasi pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Tahap kedua adalah analisis pola dan kecenderungan penelitian, yang bertujuan mengidentifikasi tema-tema dominan yang telah banyak dikaji serta aspek-aspek yang masih jarang dibahas dalam literatur. Tahap ketiga adalah sintesis konseptual, yaitu proses integrasi temuan-temuan penelitian sebelumnya untuk merumuskan peta kesenjangan penelitian (*research gap*) yang berkaitan dengan dimensi partisipasi komite sekolah, kesenjangan kapasitas antardaerah dalam penyusunan KTSP, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

Untuk menjaga validitas analisis, proses sintesis literatur dilakukan secara komparatif dengan membandingkan temuan dari berbagai penelitian yang memiliki konteks dan pendekatan

berbeda. Melalui proses tersebut, hasil kajian tidak hanya menggambarkan kecenderungan penelitian sebelumnya, tetapi juga menghasilkan proposisi konseptual yang dapat menjadi dasar pengembangan penelitian lanjutan mengenai implementasi kurikulum berbasis otonomi satuan pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan Komite Sekolah dalam Pengembangan KTSP yang Masih Bersifat Formal

Salah satu prinsip utama dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah penguatan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Secara regulatif, komite sekolah memiliki posisi strategis sebagai mitra sekolah dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Keterlibatan komite sekolah dimaksudkan untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan tidak hanya merepresentasikan perspektif internal sekolah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat sebagai lingkungan sosial peserta didik.

Namun demikian, hasil sintesis terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa dimensi partisipasi komite sekolah dalam pengembangan KTSP belum banyak menjadi fokus kajian empiris dalam literatur pendidikan. Penelitian Sadad (2017), misalnya, menunjukkan bahwa keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP pada tingkat madrasah aliyah masih terbatas pada fungsi administratif dan belum berkembang menjadi partisipasi substantif dalam proses pengambilan keputusan kurikulum. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan kurikulum berbasis partisipatif dengan praktik implementasinya di tingkat satuan pendidikan.

Dari perspektif tata kelola pendidikan berbasis partisipasi (*participatory school governance*), keterlibatan komite sekolah yang bersifat formalistik berpotensi mengurangi relevansi kurikulum terhadap kebutuhan lokal. Ketika proses pengembangan kurikulum hanya didominasi oleh aktor internal sekolah, maka peluang integrasi aspirasi masyarakat dan karakteristik lingkungan sosial peserta didik menjadi terbatas. Selain itu, keterbatasan partisipasi komite sekolah juga berdampak pada lemahnya mekanisme akuntabilitas publik terhadap proses pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa dimensi partisipasi komite sekolah masih menjadi area kajian yang terbuka untuk diteliti lebih lanjut, khususnya terkait dengan pola keterlibatan, kualitas partisipasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran komite sekolah dalam pengembangan KTSP di berbagai konteks satuan pendidikan.

Kesenjangan Kapasitas Antardaerah dalam Penyusunan KTSP

KTSP dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa satuan pendidikan memiliki kapasitas profesional untuk merancang kurikulum operasional sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks lingkungan pendidikan masing-masing. Namun demikian, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa asumsi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi riil di lapangan, khususnya pada satuan pendidikan yang berada di wilayah dengan keterbatasan sumber daya pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Halimah et al (2009) menunjukkan bahwa sebagian sekolah dasar, terutama yang berada di luar wilayah perkotaan, masih menghadapi keterbatasan dalam menyusun dokumen KTSP secara mandiri. Variasi tingkat pemahaman guru dan kepala sekolah terhadap konsep pengembangan kurikulum menyebabkan proses penyusunan KTSP sering kali dilakukan dengan mengadaptasi atau menyalin dokumen contoh yang disediakan oleh dinas pendidikan tanpa modifikasi kontekstual yang memadai.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi kurikulum melalui implementasi KTSP belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan kapasitas institusional di seluruh satuan pendidikan. Dalam konteks ini, kesenjangan kapasitas antardaerah menjadi faktor penting

yang berpengaruh terhadap kualitas pengembangan kurikulum operasional sekolah. Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya kecenderungan uniformitas kurikulum dalam bentuk baru, yaitu keseragaman dokumen kurikulum yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan lokal masing-masing satuan pendidikan.

Meskipun beberapa penelitian telah mengidentifikasi keterbatasan kapasitas satuan pendidikan dalam menyusun KTSP, kajian komparatif yang menganalisis variasi kualitas pengembangan kurikulum berdasarkan konteks geografis dan karakteristik sosial-ekonomi satuan pendidikan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang memetakan hubungan antara kapasitas pengembangan kurikulum sekolah dan kualitas implementasi pembelajaran menjadi penting untuk dilakukan.

Keterbatasan Mekanisme Evaluasi Berkelanjutan dalam Implementasi KTSP

Sebagai kurikulum operasional yang dikembangkan secara mandiri oleh satuan pendidikan, KTSP pada prinsipnya dirancang sebagai dokumen dinamis yang memerlukan proses evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Evaluasi kurikulum menjadi mekanisme penting untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dinamika perubahan sosial di lingkungan satuan pendidikan.

Namun demikian, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi KTSP belum menjadi praktik yang sistematis di sebagian satuan pendidikan. Penelitian Sadad (2017) mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, pembaruan dokumen KTSP dilakukan secara administratif tanpa melalui proses refleksi evaluatif yang komprehensif terhadap implementasi kurikulum pada tahun sebelumnya. Praktik tersebut menunjukkan bahwa fungsi evaluasi kurikulum belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen peningkatan mutu pembelajaran di tingkat satuan pendidikan.

Keterbatasan mekanisme evaluasi berkelanjutan berpotensi mengurangi fleksibilitas KTSP sebagai kurikulum berbasis konteks lokal. Tanpa adanya evaluasi yang sistematis, satuan pendidikan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan kurikulum dengan perubahan kebutuhan peserta didik dan perkembangan lingkungan sosial pendidikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya efektivitas implementasi kurikulum sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan.

Selain itu, hasil sintesis literatur juga menunjukkan bahwa hingga saat ini belum banyak penelitian yang mengembangkan model evaluasi kurikulum berkelanjutan yang aplikatif dan sesuai dengan variasi kapasitas satuan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan model evaluasi kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan menjadi salah satu agenda penelitian yang relevan untuk memperkuat implementasi KTSP sebagai kurikulum desentralistik.

Peta Celah Penelitian KTSP

Berdasarkan hasil sintesis terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi bahwa kajian mengenai KTSP selama ini cenderung berfokus pada aspek perbandingan struktural antar kurikulum serta implementasi pembelajaran pada tingkat mata pelajaran tertentu. Sementara itu, dimensi tata kelola pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan masih relatif kurang mendapatkan perhatian dalam penelitian pendidikan.

Secara lebih spesifik, terdapat tiga area kajian yang masih memerlukan penguatan penelitian lebih lanjut, yaitu: keterlibatan komite sekolah dalam pengembangan kurikulum, kesenjangan kapasitas antardaerah dalam penyusunan dokumen KTSP, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan dalam implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa implementasi KTSP sebagai kebijakan desentralisasi kurikulum masih menghadapi tantangan struktural yang perlu dianalisis secara lebih komprehensif melalui penelitian empiris lintas konteks satuan pendidikan.

Sebagai ringkasan hasil sintesis literatur, peta celah penelitian KTSP disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Peta Celah Penelitian KTSP

Dimensi	Yang Sudah Dikaji	Celah yang Belum Dikaji
Perbandingan Kurikulum	Perbedaan KTSP vs K13 secara struktural dan normatif (Hakim, 2017)	Dampak perbedaan struktural terhadap kualitas pembelajaran aktual di lapangan
Implementasi di Kelas	Penerapan KTSP pada mata pelajaran tertentu (Amar, 2019; Prasetyo, 2023)	Variasi kualitas implementasi berdasarkan konteks geografis dan kapasitas guru
Peran Komite Sekolah	Disebutkan sebagai aktor dalam regulasi, namun jarang dianalisis	Sejauh mana partisipasi komite sekolah bersifat substantif vs. formalitas
Kapasitas Antardaerah	Beberapa studi kasus lokal mengungkap keterbatasan kapasitas	Analisis komparatif sistematis antar wilayah/konteks sosial-ekonomi
Evaluasi Berkelanjutan	Disebutkan sebagai permasalahan dalam beberapa kajian	Model evaluasi kurikulum berkelanjutan yang sesuai kapasitas sekolah beragam

KESIMPULAN

Kajian terhadap literatur mengenai KTSP menunjukkan bahwa penelitian-penelitian yang ada telah memberikan fondasi yang kuat dalam memahami KTSP dari sisi perbandingan struktural dan implementasi teknis. Namun, tiga dimensi penting masih relatif terabaikan: peran komite sekolah, kesenjangan kapasitas antardaerah, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan. Ketiga dimensi ini bukan sekadar aspek teknis yang minor. Ketiganya berkaitan langsung dengan pertanyaan mendasar: apakah KTSP benar-benar telah mewujudkan otonomi kurikulum yang substantif, atau hanya otonomi formal yang tersandung oleh keterbatasan kapasitas dan lemahnya tata kelola? Menjawab pertanyaan ini memerlukan penelitian empiris yang lebih kaya, lintas konteks, dan menggunakan perspektif yang lebih holistik. Berdasarkan analisis ini, penulis merekomendasikan tiga arah penelitian lanjutan. Pertama, studi kualitatif mendalam tentang pola dan kualitas partisipasi komite sekolah dalam pengembangan KTSP di berbagai tipe satuan pendidikan. Kedua, studi komparatif sistematis antara kualitas KTSP dan capaian pembelajaran di sekolah perkotaan, semi-perkotaan, dan pedesaan atau daerah terpencil. Ketiga, pengembangan dan uji coba model evaluasi berkelanjutan KTSP yang dirancang sesuai dengan kapasitas sekolah yang beragam, dengan tetap menjunjung prinsip partisipatif dan kontekstual. Dengan mengisi celah-celah tersebut, pemahaman kita tentang KTSP akan menjadi lebih komprehensif, dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan akan lebih bumi dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

REFERENSI

- Amar, M. (2019). Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas XI SMK Tut Wuri Handayani Makassar. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 10(1), 21–33. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v10i1.156>
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2006). Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: BSNP. <https://repositori.kemendikdasmen.go.id/9206/>
- Hakim, L. (2017). Analisis Perbedaan antara Kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 17(2), 280–292. <https://doi.org/10.22373/jid.v17i2.1644>
- Halimah, L., Rostika, R. D., & Sudirjo, E. (2009). Pengembangan Model Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Yang Mengacu Pada Standar Nasional Pendidikan. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 1-18. <https://doi.org/10.17509/eh.v1i1.2724>

- Hs, F., & Damopolii, M. (2025). Analisis Komparatif Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada KTSP, K13 dan RPP Satu Lembar serta Implementasinya. *Jurnal Inovasi Pembelajaran*, 1(3), 182-200. <https://doi.org/10.71049/b4c5er66>
- Mulyasa, E. (2008). Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslich, M. (2007). KTSP: Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prasetyo, O., & Kumalasari, D. (2023). Analisis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Mata Pelajaran Sejarah sebagai Perbandingan terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). *Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 3(1), 56-66. <https://doi.org/10.20527/pakis.v3i1.7831>
- Sadad, A. (2017). Aplikasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Madrasah Aliyah Kecamatan Medan Sunggal. *AT-TAZAKKI: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam*, 1(2), 137-155. <http://dx.doi.org/10.47006/attazakki.v1i2.861>
- Supriatna, M. N., Eka Diyanti, I., & Sari Dewi, R. (2023). Analisis Perbandingan Kurikulum KTSP, K13 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Journal on Education*, 6(1), 9163–9172. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.4418>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.